

Tata Kelola Keuangan Dana Desa dan Tata Kelola Keuangan BUMDes Menuju Desa Mandiri

Enni Savitri^{1*}, Andreas², Volta Diyanto³, Musfialdy⁴

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Riau

⁴Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Suska Riau

E-mail: enni.savitri@lecturer.unri.ac.id

Abstrak

Tujuan pengabdian adalah melakukan pendampingan penggunaan aplikasi sistem inovasi digitalisasi pelaporan keuangan BUMDes dan dana desa berdasarkan SAK-ETAP. Metode Pelaksanaan ini dilakukan dengan Identifikasi Permasalahan, Tinjauan terhadap penggunaan Dana Desa yang telah dilakukan. Wawancara dengan aparat desa dan masyarakat untuk memahami kendala yang dihadapi. Hasil pengabdian ini diharapkan adanya perbaikan dalam tata kelola pengelolaan dana desa dan BUMDes yang baik membutuhkan transparansi, akuntabilitas, efisiensi, partisipasi masyarakat, dan peningkatan kapasitas pengelola. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, desa dapat memastikan bahwa dana yang ada digunakan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memajukan perekonomian desa, dan mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Implementasi tata kelola yang baik juga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan pemerintah terhadap pengelolaan dana desa dan BUMDes.

Kata Kunci: Tata Kelola, Laporan Keuangan, Dana Desa, BUMDes.

Abstract

The purpose of this community service is to provide assistance in the use of the digital innovation application for BUMDes and village fund financial reporting based on SAK-ETAP. This method is carried out by identifying problems and reviewing the use of village funds that has been carried out. Interviews with village officials and the community are conducted to understand the obstacles faced. The results of this community service are expected to improve the governance of village funds and BUMDes, which requires transparency, accountability, efficiency, community participation, and increased capacity of managers. By applying these principles, villages can ensure that available funds are used optimally to improve community welfare, advance the village economy, and achieve sustainable development. The implementation of good governance will also increase community and government trust in the management of village funds and BUMDes.

Keywords: Governance, Financial Reports, Village Funds, Village-Owned Enterprises.

Pendahuluan

Tata kelola dana desa dan BUMDes yang baik sangat penting untuk memastikan keberhasilan pembangunan desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Berikut adalah beberapa alasan mengapa tata kelola yang baik sangat penting (Ariska & Sari, 2023). Tata kelola dana desa dan BUMDes yang baik adalah kunci untuk mencapai pembangunan desa yang berkelanjutan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan kemandirian ekonomi desa. Dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, desa dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada dan mencapai

tujuan pembangunan yang lebih efektif (Lantowa & Melynsyah, 2023). Tata kelola yang baik memastikan bahwa penggunaan dana desa transparan dan akuntabel. Hal ini membantu mengurangi risiko korupsi dan penyalahgunaan dana. Dengan tata kelola yang baik, dana desa dapat digunakan dengan lebih efisien dan efektif untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah direncanakan (Sagala & Siregar, 2023). Tata kelola yang baik melibatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan penggunaan dana desa, sehingga masyarakat merasa memiliki dan berperan dalam pembangunan desa mereka. Pengelolaan dana desa yang baik dapat meningkatkan kualitas infrastruktur dan layanan publik di desa, seperti jalan, air bersih, kesehatan, dan pendidikan.

Tata kelola BUMDes yang baik dapat meningkatkan kemandirian ekonomi desa dengan menciptakan lapangan kerja dan sumber pendapatan baru bagi masyarakat desa. BUMDes yang dikelola dengan baik dapat memanfaatkan potensi dan sumber daya desa secara optimal, seperti pertanian, pariwisata, kerajinan, dan lainnya. Melalui kegiatan usaha yang dikelola oleh BUMDes, desa dapat memperoleh pendapatan tambahan yang dapat digunakan untuk mendukung berbagai program pembangunan dan kesejahteraan masyarakat (Probowulan et al., 2021). Tata kelola yang baik memastikan keberlanjutan usaha BUMDes melalui pengelolaan keuangan yang sehat, manajemen risiko yang baik, dan inovasi dalam produk dan layanan. BUMDes yang dikelola dengan baik sering kali menyediakan pelatihan dan pendidikan bagi masyarakat desa, meningkatkan kapasitas dan keterampilan mereka.

Sejak implementasi Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014, dana desa yang disalurkan oleh pemerintah pusat ke desa-desa di seluruh Indonesia terus meningkat signifikan. Pada tahun 2021, jumlah total dana desa mencapai Rp 72 triliun. Meski ada peningkatan dalam penyaluran dana, masih ada tantangan besar terkait akuntabilitas dan transparansi (Savitri et al., 2019). Banyak desa menghadapi kesulitan dalam mengelola dan melaporkan penggunaan dana secara tepat dan akurat, yang kadang memicu kasus penyalahgunaan dan korupsi. Kemampuan aparatur desa dalam mengelola dana sering kali menjadi kendala. Keterbatasan sumber daya manusia yang berkompeten dalam hal administrasi, perencanaan, dan pelaporan keuangan menjadi masalah yang umum ditemui. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan penggunaan dana desa bervariasi. Di beberapa desa, masyarakat aktif terlibat, sementara di tempat lain, partisipasi masih rendah akibat kurangnya sosialisasi atau transparansi dari pihak aparatur desa (Alfian et al., 2022).

Fenomena pada BUMDes antara lain setelah disahkannya UU Desa, banyak desa mendirikan BUMDes sebagai upaya untuk meningkatkan perekonomian desa. Pada tahun 2020, tercatat lebih dari 50.000 BUMDes yang tersebar di seluruh Indonesia. Keberhasilan BUMDes sangat bervariasi. Beberapa BUMDes berhasil mengembangkan usaha yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan desa dan kesejahteraan masyarakat. Namun, banyak juga BUMDes yang mengalami kegagalan

akibat kurangnya perencanaan yang matang, manajemen yang kurang profesional, dan kendala modal. Beberapa BUMDes menunjukkan inovasi dan diversifikasi usaha yang baik, seperti pengembangan pariwisata desa, produk pertanian organik, dan kerajinan tangan. Ini menunjukkan potensi besar BUMDes dalam memanfaatkan kekayaan lokal untuk kesejahteraan masyarakat. Banyak BUMDes yang masih membutuhkan peningkatan kapasitas dalam hal manajemen, keuangan, dan pemasaran. Pemerintah dan berbagai lembaga seringkali memberikan pelatihan dan pendampingan untuk meningkatkan kemampuan pengelola BUMDes.

Contoh Kasus antara lain BUMDes Ponggok di Desa Ponggok, Klaten, Jawa Tengah, menjadi contoh sukses dengan mengelola wisata air yang menghasilkan pendapatan besar bagi desa dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat setempat. Ada juga banyak laporan tentang penyelewengan dana desa dan BUMDes yang tidak berfungsi optimal. Misalnya, kasus di beberapa daerah di mana dana desa digunakan untuk proyek yang tidak jelas manfaatnya atau tidak selesai. Fenomena terkait tata kelola dana desa dan BUMDes di Indonesia menunjukkan bahwa meskipun ada banyak tantangan, ada juga peluang besar untuk meningkatkan pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat. Dengan memperbaiki akuntabilitas, transparansi, dan kapabilitas aparatur desa serta manajemen BUMDes, potensi dana desa dan BUMDes dapat dioptimalkan untuk kebaikan masyarakat (Nugrahaningsih et al., 2022).

Tata kelola keuangan dana desa dan tata kelola keuangan BUMDes dilaksanakan dengan baik. Dengan tata kelola keuangan dana desa dan BUMDes yang baik, desa-desa di Indonesia memiliki potensi besar untuk berkembang dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya (Savitri et al., 2022). Ini membutuhkan komitmen dari semua pihak terkait untuk terus memperbaiki dan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan dana dan sumber daya desa. Ada banyak potensi dan manfaat yang dapat dicapai, termasuk pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan, seperti jalan, jembatan, fasilitas kesehatan, dan pendidikan, yang semuanya berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat desa (Savitri et al., 2020). Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui BUMDes yang dikelola dengan baik dapat membuka peluang usaha dan lapangan kerja bagi masyarakat desa, yang pada gilirannya meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Pengembangan Potensi Lokal. Desa memiliki berbagai potensi lokal seperti pariwisata, pertanian, kerajinan, dan sumber daya alam lainnya. Dengan pengelolaan yang baik, potensi-potensi ini dapat dikembangkan menjadi sumber pendapatan yang berkelanjutan. Peningkatan Partisipasi Masyarakat. Tata kelola yang baik melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan, yang meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat terhadap pembangunan desa mereka.

Adapun manfaat antara lain Transparansi dan Akuntabilitas. Tata kelola yang baik memastikan bahwa semua proses pengelolaan dana dilakukan secara transparan dan

akuntabel, yang mengurangi risiko korupsi dan penyalahgunaan dana (Oktari & Larasati, 2023). Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Dana. Pengelolaan yang baik memastikan dana desa dan BUMDes digunakan secara efisien dan efektif untuk program dan kegiatan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. Dengan adanya infrastruktur yang memadai dan peningkatan aktivitas ekonomi, kesejahteraan masyarakat desa akan meningkat secara signifikan. Sustainability Program dan Usaha. Pengelolaan yang baik juga berarti ada perencanaan yang matang dan pengawasan yang ketat, yang memastikan bahwa program dan usaha yang dijalankan dapat berkelanjutan dalam jangka panjang (Savitri et al., 2022). Kepercayaan Publik. Masyarakat akan lebih percaya kepada pemerintah desa dan pengelola BUMDes jika mereka melihat bahwa dana yang ada dikelola dengan baik dan memberikan manfaat nyata. Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa dan Pengelola BUMDes.

Dengan pengelolaan yang baik, aparatur desa dan pengelola BUMDes akan lebih terlatih dan kompeten dalam menjalankan tugas mereka, yang akan berdampak positif pada keseluruhan tata kelola pemerintahan desa (Diyanto V & Musfi, 2022). Contohnya pada Desa Ponggok, Klaten. BUMDes Tirta Mandiri mengelola wisata air Umbul Ponggok, yang berhasil meningkatkan pendapatan desa secara signifikan dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat setempat. Pada Desa Pujon Kidul, Malang. BUMDes Pujon Kidul mengelola objek wisata agro yang juga memberikan dampak ekonomi positif bagi masyarakat desa melalui sektor pariwisata dan kuliner. Contoh BUMDes yang sudah maju di Provinsi Riau diantaranya BUMDes Tuah Bersama di Desa Sialang Kubang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, menunjukkan bahwa dengan pengelolaan yang baik, BUMDes dapat menjadi motor penggerak perekonomian desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Model seperti ini dapat diadopsi oleh BUMDes lain di Riau dan seluruh Indonesia untuk mencapai hasil yang serupa (Savitri et al., 2019).

Profil BUMDes Berkah Bersama di Desa Seresam Kecamatan Siberida, Indragiri Hulu, didirikan pada 14 Juli 2012 dengan peraturan desa, nomor 2 tanggal 28 September 2012, di Desa Seresam, Kecamatan Seberida dengan batas desa sebelah timur Pangkalan Kasai, sebelah barat Bandar Padang, sebelah utara Pangkalan Kasai dan sebelah selatan Bandar Padang. Potensi pedesaan antara lain kelapa sawit, karet, air bersih, pinang, pertanian dan penyewaan. Bertitik tolak dari analisis situasi diatas, maka identifikasi permasalahan dalam pengabdian ini adalah: a). Dari segi pengelolaan BUMDes itu masih pencatatan operasional dan pelaporan keuangannya manual belum ada sistem yang digitalisasi dan terpadu menurut SAK-ETAP. b). Belum adanya sistem aplikasi dalam pelaporan keuangan BUMDes untuk tiap usaha BUMDes dan pengelolaan dana desa belum sesuai dengan ketentuan undang-undang. c). Sumber daya manusia yang kurang terampil dalam hal pelaporan keuangan. d). BUMDes sudah ada namun belum berkembang, kebanyakan unit bisnis BUMDes hanya berupa unit usaha simpan pinjam. e). Penyertaan modal BUMDes ini juga belum jelas karena tidak adanya regulasi yang jelas

mengatur tentang penyertaan modal BUMDes yang berasal dari dana desa. f). Pembagian keuntungan BUMDes belum diatur menurut undang-undang desa. Regulasinya belum jelas sehingga kepala desa, kepala dinas dan konsultan pendamping tidak bisa membuat kebijakan karena regulasi tidak ada. Karena salah buat regulasi akan kena sanksi pidana. g). Peningkatan Pendapatan Asli Desa melalui revitalisasi pelaporan keuangan BUMDes dan Tata Kelola BUMDes. h).Pemasaran produk BUMDes yang masih terbatas pangsa pasarnya.

Tujuan pengabdian adalah mendampingi sistem digitalisasi tata kelola BUMDes berbasis web, tata kelola dana desa berbasis web. Melakukan pendampingan terhadap akun dan fitur-fitur yang digunakan. Pendampingan pada promosi hasil produk BUMdes berbasis online. Menata pelaporan keuangan dana desa sesuai undang-undang dan peraturan pemerintah.

Metode

Metode pelaksanaan untuk mengatasi permasalahan pengelolaan BUMDes dan pengelolaan Dana Desa, sebagai berikut; a). Identifikasi Permasalahan, Tinjauan terhadap penggunaan Dana Desa yang telah dilakukan. b). Wawancara dengan aparat desa dan masyarakat untuk memahami kendala yang dihadapi. c). Perencanaan, Menetapkan tujuan pengelolaan Dana Desa yang jelas dan terukur. d).Membuat rencana tindakan untuk memperbaiki pengelolaan Dana Desa. e). Pelaksanaan, Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang penggunaan Dana Desa. f).Membangun mekanisme pengawasan internal yang efektif di tingkat desa. g).Monitoring dan Evaluasi, Melakukan monitoring terhadap penggunaan Dana Desa secara berkala. h).Evaluasi terhadap efektivitas langkah-langkah yang telah diimplementasikan.

Metode Pelaksanaan untuk Mengatasi Permasalahan Pengelolaan BUMDes sebagai berikut; a).Identifikasi Permasalahan, Evaluasi kinerja dan pengelolaan BUMDes yang telah dilakukan. b).Wawancara dengan pengelola BUMDes untuk mengidentifikasi masalah yang dihadapi. c).Perencanaan, Menetapkan target peningkatan kinerja BUMDes. d).Menyusun rencana tindakan untuk meningkatkan pengelolaan BUMDes. e).Pelaksanaan, Memberikan pelatihan manajerial dan teknis kepada pengelola BUMDes. f).Mendorong kerja sama antar-BUMDes untuk meningkatkan akses pasar dan pemasaran. g).Monitoring dan Evaluasi, Monitoring terhadap kinerja BUMDes secara berkala, Evaluasi terhadap efektivitas pelatihan dan langkah-langkah peningkatan yang telah diimplementasikan.

Dengan menerapkan metode pelaksanaan yang terstruktur dan terukur, diharapkan pengelolaan Dana Desa dan BUMDes dapat menjadi lebih efektif dan efisien, serta memberikan dampak positif bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa.

Hasil dan Pembahasan

Hasil dan ketercapaian sasaran dalam tata kelola pelaporan keuangan dana desa sangat penting untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi penggunaan dana. Tata kelola pelaporan keuangan dana desa yang baik adalah kunci untuk mencapai berbagai hasil positif, termasuk transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas penggunaan dana. Dengan pelaporan yang baik, desa dapat memastikan bahwa dana yang ada digunakan secara optimal untuk kepentingan masyarakat dan pembangunan desa yang berkelanjutan. Berikut adalah beberapa hasil dan ketercapaian sasaran yang dapat dicapai melalui tata kelola pelaporan keuangan dana desa yang baik antara lain 1). **Transparansi Penggunaan Dana.** Pengelolaan keuangan yang transparan memungkinkan masyarakat untuk mengetahui bagaimana dana desa digunakan. Ini mencakup laporan yang jelas dan mudah diakses mengenai alokasi dana untuk berbagai proyek dan kegiatan. 2). **Akuntabilitas Pengelolaan Dana.** Dengan pelaporan yang akurat dan tepat waktu, aparat desa dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dana kepada masyarakat dan pemerintah pusat. Ini membantu dalam mengurangi penyalahgunaan dana dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. 3). **Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Dana.** Pelaporan yang baik membantu dalam pemantauan dan evaluasi penggunaan dana sehingga dana dapat digunakan secara lebih efisien dan efektif. Ini memastikan bahwa proyek yang didanai benar-benar memberikan manfaat yang diharapkan bagi masyarakat. 4). **Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan.** Implementasi standar akuntansi yang baik, seperti SAK ETAP (Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik), dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan desa, sehingga lebih mudah dipahami dan lebih sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku. 5). **Peningkatan Kapasitas Aparat Desa.** Dengan pelatihan dan pendampingan, kemampuan aparat desa dalam menyusun laporan keuangan yang baik meningkat. Ini juga meningkatkan pemahaman mereka tentang pentingnya pelaporan keuangan yang baik.

Ketercapaian Sasaran antara lain; 1). **Pemenuhan Regulasi.** Tata kelola pelaporan keuangan yang baik memastikan bahwa desa memenuhi semua peraturan dan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan daerah terkait pengelolaan dan pelaporan dana desa. 2). **Pengawasan dan Pengendalian Internal.** Pelaporan keuangan yang baik memudahkan proses pengawasan dan pengendalian internal, sehingga potensi penyimpangan dapat dideteksi dan ditindaklanjuti dengan cepat. 3). **Partisipasi Masyarakat.** Dengan laporan yang transparan, masyarakat dapat lebih mudah terlibat dalam pengawasan penggunaan dana desa dan memberikan masukan untuk perbaikan. Ini meningkatkan partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa. 4). **Perencanaan dan Penganggaran yang Lebih Baik.** Laporan keuangan yang baik menyediakan data yang diperlukan untuk perencanaan dan penganggaran yang lebih baik di masa depan. Ini membantu dalam membuat keputusan yang lebih tepat dan berorientasi pada hasil. 5). **Peningkatan Kepercayaan Stakeholder.** Transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan meningkatkan kepercayaan dari berbagai pihak,

termasuk pemerintah pusat, masyarakat, dan pihak ketiga yang mungkin tertarik untuk berinvestasi atau berkolaborasi dengan desa.



Gambar 1. Kegiatan Pelatihan Penyusunan Tata Kelola Keuangan
(Sumber: Tim Pelaksana 2025)

Hasil dan ketercapaian sasaran dalam tata kelola pelaporan keuangan BUMDes yang baik sangat penting untuk memastikan bahwa BUMDes dapat beroperasi secara transparan, akuntabel, dan efisien (Syahza et al., 2021). Tata kelola pelaporan keuangan BUMDes yang baik menghasilkan berbagai manfaat, termasuk transparansi, akuntabilitas, efisiensi operasional, kinerja keuangan yang sehat, serta perencanaan dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Dengan mencapai sasaran seperti kepatuhan terhadap standar akuntansi, penggunaan sistem informasi keuangan, peningkatan kapasitas pengelola, audit internal dan eksternal, serta pelibatan masyarakat dalam pengawasan, BUMDes dapat beroperasi secara lebih efektif dan berkelanjutan, memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat desa.

Berikut adalah beberapa hasil yang dapat dicapai serta ketercapaian sasaran dalam tata kelola pelaporan keuangan BUMDes antara lain; 1). Transparansi Keuangan. Pelaporan keuangan yang baik memastikan bahwa semua informasi keuangan BUMDes tersedia dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat desa, pemerintah desa, dan pemerintah daerah. 2). Akuntabilitas Pengelola. Dengan pelaporan

keuangan yang tepat, pengelola BUMDes dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dana dan kinerja keuangan mereka kepada masyarakat dan pemerintah. Ini meningkatkan kepercayaan dan dukungan dari pemangku kepentingan. 3). Efisiensi Operasional. Pelaporan keuangan yang terstruktur membantu mengidentifikasi area-area di mana efisiensi dapat ditingkatkan, memungkinkan BUMDes untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan mengurangi pemborosan. 4). Kinerja Keuangan yang Sehat. Pelaporan keuangan yang baik memungkinkan BUMDes untuk memantau kinerja keuangan secara terus-menerus, mengidentifikasi potensi masalah keuangan sejak dini, dan mengambil tindakan korektif yang diperlukan. 5). Perencanaan dan Pengambilan Keputusan yang Lebih Baik. Data keuangan yang akurat dan terkini memungkinkan pengelola BUMDes untuk membuat perencanaan yang lebih baik dan mengambil keputusan yang didasarkan pada informasi yang relevan dan tepat waktu.

Ketercapaian Sasaran dari pengabdian ini antara lain: 1). Kepatuhan terhadap Standar Akuntansi. Implementasi standar akuntansi seperti SAK ETAP (Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik) memastikan bahwa laporan keuangan BUMDes disusun sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku. 2). Penggunaan Sistem Informasi Keuangan. Menggunakan sistem informasi keuangan berbasis teknologi untuk menyusun laporan keuangan secara otomatis dan mengurangi risiko kesalahan manual. Ini juga memudahkan akses dan analisis data keuangan. 3). Peningkatan Kapasitas Pengelola. Melakukan pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi pengelola BUMDes dalam bidang akuntansi dan pelaporan keuangan. Ini memastikan bahwa mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menyusun laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu. 4). Audit Internal dan Eksternal. Melakukan audit internal secara rutin untuk memeriksa kepatuhan dan kebenaran laporan keuangan, serta mengundang auditor eksternal untuk memberikan penilaian independen terhadap laporan keuangan BUMDes. 5). Pelibatan Masyarakat dalam Pengawasan. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan keuangan BUMDes melalui forum-forum warga atau laporan publik. Ini membantu memastikan

transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan (Savitri et al., 2023).



Gambar 2. Dokumentasi Kegiatan Pelatihan
(Sumber : Tim Pelaksana 2025)

Simpulan

Tata kelola yang baik dalam pengelolaan dana desa dan BUMDes merupakan kunci untuk mencapai pembangunan desa yang berkelanjutan, transparan, dan akuntabel. Pada tata kelola keuangan dana desa penting adanya transparansi. Transparansi dalam pengelolaan dana desa memastikan bahwa semua penggunaan dana dapat diakses dan diaudit oleh masyarakat dan pihak berwenang, mengurangi risiko penyalahgunaan dana dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Akuntabilitas yang tinggi diperlukan untuk memastikan bahwa dana desa digunakan sesuai dengan perencanaan dan peruntukannya. Ini melibatkan pelaporan yang tepat waktu dan lengkap, serta mekanisme pengawasan yang efektif. Dana desa harus dikelola dengan efisien untuk memaksimalkan dampaknya. Ini melibatkan perencanaan yang matang, pengawasan yang ketat, dan evaluasi yang berkelanjutan untuk memastikan bahwa dana tersebut digunakan untuk proyek-proyek yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat desa. Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pengawasan, dan evaluasi penggunaan dana desa sangat penting untuk memastikan bahwa dana tersebut digunakan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas masyarakat setempat. Pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi aparatur desa dalam pengelolaan keuangan, perencanaan, dan pelaporan sangat penting untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam mengelola dana desa secara profesional dan bertanggung jawab.

Pada Tata kelola BUMDes yang perlu diperhatikan adalah Laporan keuangan yang transparan memungkinkan pemangku kepentingan, termasuk masyarakat desa, untuk memahami bagaimana dana BUMDes digunakan dan memastikan bahwa dana tersebut dikelola dengan baik. Pengelola BUMDes harus bertanggung jawab atas penggunaan dana dan kinerja usaha mereka. Ini melibatkan pelaporan yang akurat dan tepat waktu, serta mekanisme pengawasan yang ketat. BUMDes harus dikelola dengan efisien untuk memaksimalkan penggunaan sumber daya dan mengurangi pemborosan. Ini melibatkan penerapan praktik bisnis yang baik dan pengawasan yang efektif. Diversifikasi usaha BUMDes dapat mengurangi risiko bisnis dan meningkatkan peluang pendapatan. Ini melibatkan eksplorasi dan pengembangan berbagai jenis usaha yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan desa. Pelatihan dan pendampingan bagi pengelola BUMDes dalam bidang manajemen, keuangan, pemasaran, dan operasional sangat penting untuk memastikan bahwa mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menjalankan usaha secara efektif dan berkelanjutan.

Referensi

- Ariska I, Dasila RA, Sari N. (2023). Pengaruh teknologi informasi akuntansi, kompetensi, dan pelatihan terhadap kualitas laporan keuangan bumdes. *Jesya*, (6),1447–1458. <https://doi.org/10.36778/jesya.v6i2.1125>.
- Lantowa FD, Melynsyah Y. (2023). Pemanfaatan sistem informasi akuntansi (SIA) dalam meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan badan usaha milik desa (Bumdes) di Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MEMBANGUN NEGERI*,7(2), 51–60.
- Sagala MKA, Siregar S. (2023). Pengelolaan Keuangan Sistem Informasi Akuntansi dan Transparansi Kinerja Keuangan Pada BUMDes. *E-Jurnal Akuntansi*, 33(6),1613. <https://doi.org/10.24843/eja.2023.v33.i06.p015>.
- Oktari V, Larasati S. (2023). Pelatihan penyusunan laporan keuangan berbasis teknologi digital Pada BUMDES Tanjung Indah Curup Selatan Rejang Lebong. *ALKHIDMAH: Jurnal Pengabdian dan Kemitraan Masyarakat*, 1(1), 41–48. <https://doi.org/10.59246/alkhidmah.v1i1.179>.
- Probowulan D, Oktavianto H, Dimas DK, Muh Nur IF. (2021). Urgensi pelaporan keuangan digital BUMDES Amanah Desa Pondokrejo Kec. Tempurejo Kab. Jember. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Manage*, 2(2), 98-103. <https://doi.org/10.32528/jpmm.v2i2.4967>.
- Alfian M, Kartika D, Ferida A. (2022). Implementasi sistem informasi akuntansi dan administrasi berbasis digital. *DIKEMAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(1):32–37. <https://doi.org/10.32486/dikemas.v6i1.247>.
- Nugrahaningsih P, Rahmawati LDA, Arista D, Ardila LN. (2022). Knowledge transfer for community development dengan aplikasi excel pkn stan pada penyusunan laporan keuangan bumdes (Studi pada Bumdes Multi Guna Desa Sidomulyo Madiun). *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(2)96-103. <https://doi.org/10.24198/kumawula.v5i2.36321>.
- Savitri E, Andreas, Diyanto V. (2022). Pendampingan keuangan BUMDes Berbasis Web. *Journal of Community Engagement Research for Sustainability*, 2(6), 268-277. 0.31258/cers.2.6.268-277.

- Diyanto V, Musfi PN. (2022). Digitalisation of financial report of village owned enterprised. *Indonesian of Journal Economics, Social and Humanities*. 4(3),205-210. <https://doi.org/10.31258/ijesh.4.3.205-210>.
- Syahza A, Savitri E, Asmit B. (2021). Meiwanda. Small-scale agricultural product marketing innovation through BUMDes and MSMEs empowerment in coastal areas. *Management Sciences Letters*, 11(8), 2291-2300. <https://doi.org/10.5267/j.msl.2021.3.015>.
- Savitri E, Andreas, Diyanto V. (2019). Peningkatan pendapatan asli desa melalui pembinaan revitalisasi BUMDes dan tata kelola dana desa (studi pada Desa Tanjung Alai Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar Provinsi Riau. *Unri Conference Series: Community Engagement*, 1, 606-613. <https://doi.org/10.31258/unricsce.1.606-613>.
- Savitri E, Gumanti TA, Andreas, Diyanto V. (2020). The effect of leadership, internal control system and organizational commitment on accountability of village financial management. *Journal of Application Management*, 18(3), 522-532. <http://dx.doi.org/10.21776/ub.jam.2020.018.03.12>
- Savitri E, Andreas, Diyanto V. (2019). Accontability of village funds management. *Journal of Application Management*, 17(3), 515-521. <http://dx.doi.org/10.21776/ub.jam.2019.017.03.16>
- Savitri E, Andreas, Diyanto V, Gumanti TA. (2022). Accountability of village fund management in Riau Province. *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer*, 14(2), 131-138. <http://dx.doi.org/10.23969/jrak.v14i2.5550>.
- Savitri E, Diyanto V, Abdullah NHN. (2023). The effect of internal control systems, community participation, and village financial system on the accountability of village fund management: Prosocial Behavior as Moderation, 6(6), 772-789.